



MENUMBUHKEMBANGKAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan, Pencatatan Sipil**

KEMISKINAN

- **Kemiskinan identik dengan suatu kondisi serba kekurangan, kekumuhan, kelaparan dan Sejenisnya .**

Kondisi kehidupan seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu (*tidak berdaya*) dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya secara layak untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat

(*robert chambers*).

Hak-hak dasar secara umum adalah

- ***Terpenuhinya Konsumsi bahan pokok*** antara lain terpenuhinya pangan, sandang, dan papan
- ***Terpenuhinya pelayanan Dasar pokok*** antara lain terpenuhinya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, air bersih, perumahan, atas tanah, hak atas SDA dan lingkungan hidup, rasa aman dari tindak kekerasan,
- ***Terpenuhinya hak untuk berpartisipasi*** dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, baik perempuan maupun laki-laki.

- **Hak-hak dasar tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, karena saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.**
- **Sumber awal dan utama kemiskinan adalah ketidakberdayaan kondisi ini membawa implikasi pada faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun spiritual “.**

FAKTOR EKONOMI :

- **Terbatasnya aset khususnya faktor produksi,**
- **Rendahnya upah, posisi tawar Rendah,**
- **Kemampuan dlm merespon peluang ekonomi rendah,**
- **Rentan terhadap kebutuhan yg mendesak.**

FAKTOR POLITIK :

- **Kecilnya akses dalam proses pengambilan keputusan,**
- **Lemahnya posisi tawar dalam membela hak-hak politik,**
- **Perlakuan yang diskriminatif.**

FAKTOR SOSIAL :

- **Rendahnya akses informasi dan pelayanan sosial,**
- **Lemahnya jaringan interaksi sosial dan**
- **Kondisi terpinggirkan dalam sistem sosialnya.**

FAKTOR BUDAYA

- **Lemahnya daya dukung dan daya dorong nilai-nilai kultural terhadap usaha peningkatan Kondisi kehidupan.**

FAKTOR SPIRITUAL

- **Sikap dan perasaan rendah diri, malas tidak mau bekerja keras, tidak disiplin menggantungkan orang lain dsb.**

KOMPLEKSITAS SITUASI KETIDAKBERDAYAAN MASYARAKAT



LINGKARAN KEMISKINAN



FAKTOR-FAKTOR KETIDAKBERDAYAAN MASYARAKAT

HISTORIS

Trauma pada kegagalan.

Pernah mengalami eksploitasi/tekanan dari kekuatan yang lebih besar.

KULTURAL

Memandang kompetisi sebagai tabu.

Menganggap keberanian bernisiatif dan bertanya sebagai tabu.

Memandang pemimpin sebagai sumber kebenaran.

STRUKTURAL

Eksploitasi pemilik modal

Kebijakan yang tidak memihak kepentingan masyarakat

Intimidasi oleh aparaturnegara/milisi *private*

**Sejalan dengan hal tersebut diatas,
dalam upaya penanggulangan kemiskinan
perlu
dilakukan *pendekatan yang berbasis
pemberdayaan dalam pemenuhan hak –hak
dasar masyarakat miskin.***

APAKAH PEMBERDAYAAN?

“Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan **kemandirian dan kesejahteraan masyarakat** dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”.

(UU No. 6/2014 tentang Desa)

Menurut Edi Suharto (1985)

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya

Menurut Organisasi Dunia PBB (1960)

***Pemberdayaan Masyarakat* merupakan proses dimana usaha-usaha dari masyarakat sendiri “disatukan” dengan kewenangan-kewenangan yang ada pada “pemerintah” untuk meningkatkan taraf hidup (kondisi) ekonomi, social dan budaya suatu komunitas, untuk mengintegrasikan komunitas tersebut dengan kehidupan bangsa dan membuat komunitas itu mampu memberi kontribusi secara penuh terhadap kemajuan nasional**

Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat :

1. Harus ada partisipasi masyarakat (ikut serta terhadap kesepakatan kolektif), tanpa kesepakatan kolektif, keikutsertaan masyarakat dinamakan mobilisasi.
2. Pembangunan bersifat Bottom-up, artinya inisiatif didesain oleh masyarakat dan pemerintah membuat kebijakan – kebijakan umum atau garis-garis besar.
3. Pembangunan berorientasi pada pengembangan kearifan local.
4. Keterbukaan (Transparan).
5. Empati.
6. Kesepakatan bersama/ Musyawarah.
7. Kerjasama.
8. Sesuai dengan Kebutuhan.
9. Anti Kekerasan/ Pemaksaan.
10. Mengutamakan Proses dan Hasil.
11. Berkelanjutan (Pelestarian).



**Pembangunan tidak hanya
pada ekonomi, politik,
sosial, budaya (Demokrasi,
HAM)**

**Manusia
sebagai
subyek**

**PEMBERDAYAAN: Memampukan manusia,
menggerakkan pembangunan yang berpusat pada
manusia.**

CIRI-CIRI MASYARAKAT BERDAYA

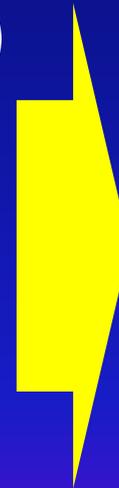
KONDISI yang baik, dimana seluruh anggota masyarakat Desa makmur secara ekonomi, sehat jiwa-raga, dan damai.

KONDISI ketika Pemerintah Desa dan masyarakat Desa mampu melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri.

SEJAHTERA



MANDIRI



MASYARAKAT BERDAYA

Sejahtera & Mandiri melalui peningkatan kualitas sisi dasar kehidupan

KOMPONEN	CIRI-CIRI
PENGETAHUAN	Memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan mendalam, khususnya terkait bidang utama yang menentukan kehidupannya.
SIKAP	Mampu mengembangkan inisiatif, aktif sebagai warga masyarakat, bertanggung jawab, dan melestarikan solidaritas sosial.
KETERAMPILAN	Menguasai keterampilan teknis yang memadai untuk menopang produktifitas dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, dan sosial).
PERILAKU	Kondusif bagi pengembangan perilaku yang sinkron dengan hak dan kewajiban masyarakat.
KESADARAN	Memiliki kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat Desa.

ADAPUN CARA – CARA YANG DITEMPUH ANTARA LAIN :

MASYARAKAT MENENTUKAN KEBUTUHAN-KEBUTUHANNYA, SERTA MEMBUAT DAFTAR MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPINYA, BAIK MASALAH PERORANGAN MAUPUN MASALAH MASYARAKAT.



MEREKA SENDIRI MEMBUAT ANALISANYA UNTUK SELANJUTNYA MENYUSUN RENCANA USAHA PERBAIKAN YANG AKAN DILAKUKAN.



MEREKA MENGORGANISASIKAN DIRINYA SENDIRI UNTUK MELAKUKAN USAHA TERSEBUT.



DALAM PELAKSANAANNYA SUMBER-SUMBER DALAM MASYARAKAT SEJAUH MUNGKIN DAPAT DIGALI, BAIK DAYA MAUPUN TENAGA SERTA DANA. TAMBAHAN BANTUAN DARI LUAR BARU DIMINTA KALAU BETUL-BETUL DIPERLUKAN.

CONTOH & LANGKAH MEMBANGUN KESADARAN KRITIS

KADERISASI

Pembentukan dan pemeliharaan kader sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

PENGGORGANISASIAN (COMMUNITY ORGANIZING)

Pengorganisasian masyarakat melalui dinamisasi organisasi lokal desa dan antar desa

PEMBELAJARAN SOSIAL

Pelatihan masyarakat melalui learning by capacity dan learning by doing

LIMA STRATEGI PEMBERDAYAAN YANG DAPAT DISINGKAT MENJADI 5P:

- 1. Pemungkinan** : menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal.
- 2. Penguatan** : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- 3. Perlindungan** : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
- 4. Penyokongan** : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5. Pemeliharaan** : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

1. IDENTIFIKASI POTENSI
2. HAMBATAN-HAMBATAN PEMANFAATAN

1. CIPTAKAN KONDISI YG DAPAT MENGGERAKAKAN POTENSI

4. TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MENYELURUH

1. CIPTAKAN JARINGAN KERJA
2. TAMBAHKAN FUNGSI BARU
3. TENTUKAN KEGIATAN PADA LEMBAGA YG TEPAT

TAHAPAN PEMBERDAYAAN

1. STUDI BANDING
2. PELATIHAN-PELATIHAN
3. DEMONSTRASI

2. TINGKATKAN MUTU POTENSI

3. USAHAKAN KELANGSUNGAN KEGIATAN

1. KEGIATAN LANJUTAN
2. MENCETAK KADER
3. FORUM DISKUSI

SETIAP BENTUK PEMBERDAYAAN MEMILIKI ORIENTASI/TUJUAN TERSENDIRI

BANTUAN SOSIAL

- Pemberdayaan yang berorientasi pemberian bantuan yang bersifat langsung (uang ataupun alat)

PENGEMBANGAN KAPASITAS & AKSESIBILITAS

- Pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis tertentu dan membuka akses bagi kelompok yang tereksklusi.

PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

- Pengembangan dan pelebagaan kesadaran dan praktik kerjasama dalam suatu bidang yang bersifat khusus untuk tujuan tertentu.

ADVOKASI

- Pemberdayaan yang berorientasi untuk mempengaruhi, merubah, atau membuat kebijakan.

PENGEMBANGAN SOCIAL CONTROL

- Pengembangan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam membangun hubungan kritis dengan otoritas politik Desa.

Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

1. Masyarakat mempunyai kemampuan dalam hal pengambilan keputusan untuk menentukan kebutuhannya.
2. Masyarakat mempunyai kemampuan mengelola dan memobilisasi sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan yang ada untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Masyarakat mempunyai kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan mampu memecahkannya.
4. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan komunitasnya pada khususnya dan ikut berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa dan negara pada umumnya.

Ketrampilan yang diperlukan dalam Pemberdayaan Masyarakat

1. Kemampuan mengumpulkan data
2. Kemampuan menganalisis dan mengidentifikasi masalah.
3. Kemampuan melakukan interaksi atau membangun hubungan dengan setiap kalangan.
4. Kemampuan berorganisasi.
5. Kemampuan menata proyek
6. Kemampuan memberikan pelatihan

KREDO PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Datanglah kepada masyarakat

Hidup bersama mereka

Belajar dari mereka

Rencanakan bersama masyarakat

Mulailah dengan apa yang diketahui masyarakat

Bangunlah apa yang dimiliki masyarakat

Ajarilah dengan memberi contoh, belajarliah dengan bekerja

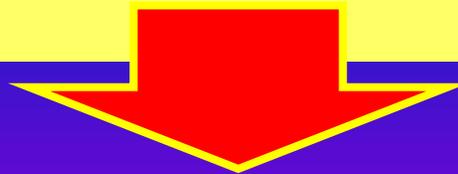
Bukan pameran melainkan pola

Bukan rintangan dan akhir melainkan suatu system

Bukan pendekatan cerai berai melainkan menyatu

Bukan kompromi melainkan mengubah

Bukan pertolongan melainkan pembebasan



**HINGGA AKHIRNYA MASYARAKAT :
KAMI MAMPU MELAKUKAN SENDIRI SEMUA PROGRAM**

DISPERMADESDUKCAPIL PROVINSI JATENG

- Tugas kita adalah mendorong pemerintah daerah / pemeran pemberdayaan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian

Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan **UEM** Diarahkan Pada Peningkatan dan Pengemb
Usaha & Terbukanya Kesempatan Berusaha yg Luas bagi masy.
yg berorientasi Pasar.

STRATEGI

Memberikan
Kemudahan
bagi Masya.
dlm mengak-
ses sumber2
daya produktif
(modal, TTG
dsb)

Peningkatan
kapasitas/prod
uktivitas usaha
(Pengelolaan,
Pelat. ketramp,
Pemasaran)

Penguatan
kemitraan /
jejaring usaha
serta Perlin-
dungan usaha
masyarakat

Mensinergikan
kebijakan dan
pelaksanaan
prog/keg
(integrasi
pelaksanaan
prog/keg)

Pelestarian dan
keberlanjutan
pelaksanaan
prog/kegiatan
Berbasis
pemberdayaan

INSTRUMEN

Stimulan (modal
dan Peralatan)

Pelat/ Katramp.
dan Manajemen
Ush

Regulasi dan
Kerjasama

BUMDES

Penguatan
Kelembagaan
UEM

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan

Sasaran

Out Put

PEMB. SARPRAS
DASAR EKONOMI
MASYA (Fasum,
Fasek)

- Pasar Desa

Sinergitas
Pembangunan
Sarpras Dasar Masya
(Publik Service)

PENINGKATAN
KAPASITAS SDM

- Pelatihan
Masya/ Aparat
- Penguatan
Kelembagaan

Penguatan
Sosial Capital

Menguatnya
Kapasitas Masyarakat
,Kelembagaan dan
Pemrth Lokal

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan

Penguatan Permodalan dan Peningk/Pengem-Produk U E M

Penguatan Jaringan dan Kemitraan

- Pemasaran
- Pengelolaan
- Peralatan

Sasaran

- UED-SP
- UP2K
- CPPD
- BUMDes

- Perlindungan usaha
- Pemanfaatan TTG

Out Put

Tumbuh dan Berkembangnya Keg. Ush Ekonomi Masya

Keberlanjutan Usaha Ekonomi Masyarakat

SPIRIT UNDANG UNDANG NO. 6 TAHUN 2014



- Berlakunya UU No. 6 Th. 2014 ttg Desa Menguatkan Penyelenggaraan Otonomi Desa
- *Otonomi Desa* memberikan *kewenangan yang besar pada Desa* (ps. 18)
- Otonomi Desa membuat *Fungsi Pemerintah* dapat berjalan dengan lebih baik.
- Proses *bottom up* yang melibatkan partisipasi masyarakat akan lebih mudah terealisasi.

KEWENANGAN DESA

(Ps. 18 UU 6/14)

KEWENANGAN

PELAKS

CAKUPAN

PENDANAAN

Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Kewenangan lokal berskala Desa

Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Prov atau Kab.

Kewenangan yg ditugaskan Pemda, Prov./ Kab. sesuai ketentuan

Diatur dan diurus oleh Desa

Diurus oleh Desa

Hak asal-usul merupakan warisan yg masih hidup dan Berkembang dimasyal Desa

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa

Penugasan meliputi

- **Pemerintahan**
- **pembangunan ,**
- **Kemasyarakatan**
- **Pemberdayaan**
- **Penugasan disertai biaya**

APBDesa

APBdesal DD/APBD

- **APBN**
- **APBD KAB**
- **APBD PROV**

- **PEMERINTAHAN**
- **PEMBANGUNAN**
- **PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
- **PEMBERDAYAAN**

DD BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.

- Jaringan internet untuk warga desa.
- Website Desa.
- Peralatan pengeras suara.
- Telepon Umum.

- Radio Single Side Band.
- Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

DD Bidang Informasi dan Komunikasi

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

**Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi**

- Jaringan internet untuk warga desa.
- Website Desa.
- Telepon Umum.

- Radio komunitas
- Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan Desa.

TERIMA KASIH

